



## **Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut)**

Jajang Saepuloh

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang merupakan aparatur SKP di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi sebagai variabel bebas terhadap kinerja manajerial SKPD sebagai variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Selain itu, penelitian ini memberikan indikasi bahwa tidak semua variabel berpengaruh secara positif dan signifikan, diharapkan bahwa SKPD Dispora Kabupaten Garut bisa lebih meningkatkan lagi rencana kinerja anggaran sejelas dan spesifik mungkin, selain itu diperlukan keterbukaan terhadap penyelenggaraan dan laporan pertanggungjawaban kepada publik, serta komitmen yang semakin tinggi bisa tercipta diantara SKPD untuk tetap berkontribusi bagi Dispora Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** DISPORA, Kinerja Manajerial, SKPD.

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diganti melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 undang – undang ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar setiap daerah secara sistematis, spesifik, terintegrasi, komprehensif dan tanggap terhadap perubahan harus menyusun rencana pembangunan daerah dengan tingkat perencanaan perencanaan di masa depan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan setiap.

Agar semua rencana dapat terealisasikan dengan baik tentu perlu adanya sebuah akuntabilitas dari pemerintah sendiri dimana pada sebuah organisasi pelimpahan wewenang dan besarnya tanggungjawab dalam menyusun anggaran dilaksanakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada para bawahan. Struktur organisasi yang sangat tersentralisasi artinya bawa setiap keputusan yang mendesak dibuat oleh manajemen puncak, sedangkan tingkat menengah dan bawah memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang sangat sedikit. Kekuasaan didelegasikan kepada bawahan, dan bawahan diberi kekuasaan dan kekuasaan untuk membuat keputusan yang independen. (Riyadi, 2016). Beberapa faktor bisa berpengaruh bagi kinerja manajerial di Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya target anggaran, akuntabilitas sektor publik (struktur terpusat), komitmen organisasi dan standar pelayanan minimal (Erwati & Susanti, 2020).

Kejelasan sasaran anggaran digunakan untuk mempermudah SKPD saat merumuskan rencana aksi yang akan dirumuskan oleh pemerintah daerah, anggaran dapat digunakan untuk melaksanakan kinerja pada pencapaian SKPD, dan kualitas anggaran ditentukan oleh pemerintah daerah. (Erwati & Susanti, 2020). Pada penelitian Putra (2015) kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, dimana besarnya anggaran daerah ditentukan dari kualitas kinerja wewenang dari pemerintah daerah (Fajri & Hartono, 2019). Di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sendiri melihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala dinas Kuswendi (2020) mengatakan bahwa anggaran APBD yang ada tentu digunakan untuk pembangunan sarana olahraga (SOR) guna peningkatan prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda, akan tetapi kesulitan dalam mengontrol pembangunan sarana yang masih menjadi kendala dan kejelasan anggaran yang ditutup-tutupi dan juga anggaran yang terbagi kepada berbagai program yang tentunya mempengaruhi terhadap kinerja dari pelaksana.

Akan tetapi kenyataan dilapangan pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Garut terkendala kasus korupsi yang dilakukan oleh Kadispora dan kepala bidang kemitraan sarana dan prasarana Dispora Garut. Dugaan kerugian akibat korupsi pembangunan Sarana Olahraga Ciateul (SOR) senilai Rp 1 Miliar keseluruhan jumlah pembangunan SOR Ciateul sebesar Rp. 6,7 Miliar (iNew.id, 2020). Selain daripada itu, perlu juga memperhatikan rencana anggaran kinerja agar bisa sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan. Untuk menghindari terjadi kecurangan, dan penggunaan anggaran yang tidak jelas perlu juga merumuskan sasaran anggaran.

Selanjutnya mengenai akuntabilitas sektor publik dimana di dalam organisasi, tanggung jawab dan tanggung jawab utama penganggaran dialihkan dari manajemen SKPD kepada bawahannya, dengan menggunakan struktur desentralisasi. Struktur organisasi didukung oleh tingkat sentralisasi yang sangat terkonsentrasi, ini artinya setiap keputusan mendesak sedang dibuat atau diputuskan oleh manajemen tingkat puncak, sementara manajemen menengah dan bawah hampir tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan, dan tingkat desentralisasi yang tinggi akan menyebabkan situasi sebaliknya, yaitu menciptakan kekuasaan diantara berbagai jenis keputusan yang ada (Erwati & Susanti, 2020).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas terkait faktor yang berpengaruh rendahnya kinerja manajerial terhadap satuan kerja perangkat daerah di dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut seperti yang dipaparkan oleh (Warisno, 2017) mengenai kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, standar pelayanan minimum, dan komitmen organisasi dirasa masih kurang dengan bukti pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sudah terbengkalai selama kurang lebih 5 tahun. Maka dari itu peneliti berupaya menganalisis ifaktor-faktor iyang mempengaruhi kinerja manajerial terhadap satuan kerja perangkat daerah di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut

## 1.1 Maksud dan Tujuan Penelitian

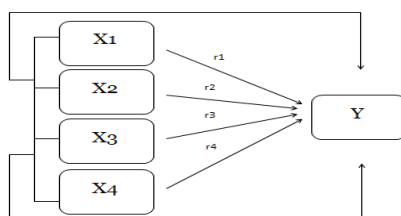
Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji masalah yang terjadi khususnya pada kinerja manajerial pada SKPD di Dispora Kabupaten Garut, dan yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian ini. Adapun variabel yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, istandari pelayanan

iminimum dan ikomitmen iorganisasi. Sedangkan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja manajerial SKPD di DISPORA Kabupaten Garut.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data primer dimana peneliti melakukan penyebaran kuesioner ke objek penelitian. Adapun penyebaran kuesioner menyebar ke objek penelitian yaitu SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Garut.

Paradigma dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel tersebut di atas yang merupakan model yang bersifat convergen dimana terdiri dari 2 kelompok variabel, yaitu variabel bebas (Independent) dan variabel terikat (Dependent) (Sugiyono, 2017). Secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Peneliti selanjutnya menyusun langkah-langkah guna memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data dan mengolah data yang didapatkan dari responden sesuai dengan asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, konsep-konsep dan teori-teori dari variabel penelitian. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
<b>Variabel X1</b> Kejelasan Sasaran Anggaran Locke dan Lathan Helmiyah & Murhaban (2016)	Pengukuran sasaran efektif rencana kinerja anggaran	Spesifikasi bentuk anggaran	SKPD Menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang bentuk anggaran akan dianggarkan.
		Tujuan	SKPD merencanakan anggaran dengan jelas dan spesifik sesuai dengan jumlah anggaran pada unit kerja masing-masing Menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan tujuan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang
		Standar	Menyusun standar rencana kerja anggaran yang jelas untuk pelaksanaan program kerja masing-masing bidang

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
		Jangka Waktu	Penyusunan rencana kerja anggaran direalisasikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
		Sasaran Prioritas	Rencana kerja anggaran lebih diprioritaskan untuk penggunaan anggaran yang paling dibutuhkan dan harus didahulukan Upaya mencapai sasaran anggaran yang jelas sesuai dengan rencana kerja anggaran merupakan tugas bersama SKPD DISPORA
		Tingkat Kesulitan	Mampu menentukan tingkat kesulitan dalam merumuskan anggaran sesuai kebutuhan Mengetahui sasaran anggaran yang jelas berdasarkan tingkat kesulitannya
		Koordinasi	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran diantara setiap SKPD
<b>Variabel X2</b>  Akuntabilitas Publik, Mardiasmo (2018)	Akuntabilitas Hukum	Tanggung jawab dan wewenang	Pelaksanaan kinerja sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing bidang
		Jaminan kepatuhan hukum	Adanya kepatuhan terhadap penggunaan anggaran dan dijamin kepastiannya oleh hukum
	Akuntabilitas Proses	Kesesuaian terhadap prosedur	Pelaksanaan tugas oleh masing-masing SKPD Dispora sesuai dengan prosedur yang berlaku
		Responsif	Keterbukaan pelaporan kinerja dan tanggung jawab SKPD bisa diakses oleh publik dan publik merespon dengan baik
	Akuntabilitas Program	Kesesuaian dengan tujuan	Setiap program yang direncanakan bisa dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
		Program pengganti	Adanya program kerja tambahan (Pengganti) yang bisa mengganti apabila program utama tidak berjalan sesuai rencana
	Akuntabilitas Kebijakan	Aturan dalam menyusun anggaran	Merencanakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing program kerja SKPD
		Implementasi dan Evaluasi	Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan program kerja yang sudah diimplementasikan
<b>Variabel X3</b>  Standar Pelayanan Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan menurut Endarti	Tolok ukur penyediaan pelayanan	Indikator pelayanan	Penyajian prosedur pelayanan disajikan secara jelas, sederhana dan adanya kepastian dalam pelayanan
			Menjamin keterbukaan dalam memberikan pelayanan
			Pelayanan yang diberikan diselenggarakan secara efektif dan efisien

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
(Erwati & Susanti, 2019)	Sebagai kuantitas dan kualitas layanan	Rencana pencapai	Penyusunan rencana pencapaian kinerja dalam pelayanan disajikan secara rinci Rencana pencapaian dilaksanakan secara sistematis
		Sumber daya yang dimiliki	Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara optimal Memfaatkan SDM yang ada secara maksimal
		Penyajian SPM	Adanya sistem informasi mengenai Standar Pelayanan Minimum yang bisa diakses oleh publik
		Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan satuan kerja	Adanya kesesuaian antara SPM dengan perkembangan kebutuhan pada SKPD Adanya kesesuaian antara SPM dengan kemampuan yang dimiliki oleh SKPD
		Keinginan kuat	Adanya keinginan yang kuat untuk tetap bertahan dalam organisasi
<b>Variabel X4</b>  Komitmen Organisasi Judge (Febrina & Ratnasari, 2020)	Komitmen Afektif	Rasa percaya diri	Rasa percaya diri membangun komitmen kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
		Lama bekerja	Komitmen organisasi ditandai dengan lamanya bekerja
		Kontribusi	Senantiasa berkontribusi untuk kemajuan organisasi
		Keinginan berusaha keras dalam bekerja	Setiap SKPD memiliki semangat kerja keras yang tinggi dalam bekerja dan memenuhi tanggung jawabnya
	Komitmen Normatif	Pertanggung jawaban	Setiap SKPD bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya
		Norma individu	Komitmen yang kuat di dasari dari norma individu yang dimilikinya
		Loyalitas	Adanya perasaan bahwa organisasi merupakan tempatnya bekerja dan tinggal
		Adanya motivasi	Setiap SKPD memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja memenuhi tugas dan tanggung jawabnya
	Komitmen Kontinyu (Berkelanjutan)	Kredibilitas	Setiap SKPD saling menghormati dan bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
		Komitmen muncul berdasarkan untung rugi	Adanya komitmen yang kuat berdasarkan kontribusi yang telah diberikan dengan balasan yang sepadan
<b>Variabel Y</b>		Perencanaan	Menentukan tujuan

Variabel	Dimensi	Indikator	Butir Item
Kinerja Manajerial Mahoney (Wijayanti, 2018)	Investigasi	Prosedur	Prosedur pelaksanaan kebijakan dalam merumuskan program kerja merupakan tugas bersama
		Informasi	Kepala dinas dan setiap kepala bidang ikut berperan dalam mengumpulkan dan menyediakan informasi dalam bentuk catatan dan laporan
	Koordinasi	Mengukur hasil	Adanya pengukuran hasil kinerja SKPD sebagai bentuk evaluasi Adanya proses analisis kinerja dalam mengukur kinerja dengan hasil kinerja yang sudah dicapai oleh setiap SKPD
		Informasi mengenai anggaran	Setiap SKPD saling berperan untuk tukar menukar informasi dan melakukan koordinasi terkait penyesuaian anggaran yang ada
	Evaluasi	Menilai dan mengukur proposal	Adanya evaluasi terhadap penilaian rencana kerja anggaran dengan implementasi penggunaan anggaran
		Penilaian dan pengukuran kinerja	Adanya penilaian terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi
	Supervisi (pengawasan)	Arahan	Arahan dalam pelaksanaan kinerja anggota dan program kerja diarahkan oleh kepala dinas
		Memimpin	Kepala dinas memimpin dalam melakukan proses pengawasan kinerja
	Staffing (pengaturan staf)	Merekrut pegawai	Perekrutan pegawai dilaksanakan sesuai dengan aturan (undang-undang) yang berlaku
		Menempatkan pegawai	Pengisian jabatan yang kosong dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku Penempatan pegawai diselenggarakan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
	Negosiasi	Kesepakatan	Setiap SKPD melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan organisasi
	Representasi	Informasi	Penyampaian informasi mengenai visi, misi dan kegiatan organisasi dengan jelas kepada seluruh SKPD di lingkungan Dispora

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan oleh peneliti sekaligus hasil penelitian deskriptif melalui penjumlahan kumulatif, ditemukan berbagai hasil yang beragam pada setiap variabel yang ada. Selain itu dalam setiap variabel yang menjadi faktor yang menghambat rendahnya kinerja manajerial tersebut menjadi perbaikan kedepannya mana saja yang perlu ditingkatkan dan kinerja berdasarkan variabel mana yang perlu juga diperbaiki. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dimensi dimensi pada setiap variabel penelitian diantaranya:

- a. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dimensi pengukuran sasaran efektif rencana kinerja anggaran, berdasarkan hasil pengujian, dapat dijelaskan bahwa secara parsial hasil pengukuran dimensi dari variabel kejelasan sasaran anggaran. Dimana pada dimensi ini hanya terdapat 1 dimensi yaitu pengukuran sasaran efektif dari rencana kinerja anggaran. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa dimensi ini termasuk pada kriteria cukup baik, responden menilai bahwa ukuran dari kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan di DISPORA Kabupaten Garut belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku hanya beberapa saja yang menyatakan hal tersebut sudah sesuai.
- b. Variabel Akuntabilitas Sektor Publik dengan 4 dimensi yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, berdasarkan hasil pengukuran kumulatif bahwa dimensi pada variabel ini rata-rata berada pada indikator cukup baik. Dimana kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dari merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan sudah dilaksanakan di lingkungan SKPD Dispora Kabupaten Garut, dimana sebelum ditentukan program tersebut diidentifikasi berdasarkan kebutuhan dan urgensi dari program yang akan dilaksanakan, selain dari pada itu terdapat evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala baik itu pada program kerja jangka panjang maupun jangka pendek, diharapkan evaluasi ini bisa semakin memperbaiki kondisi kebutuhan dan penggunaan anggaran yang semakin efektif dan efisien.
- c. Variabel Standar Pelayanan Minimum, yang terdiri dari 2 dimensi yaitu tolok ukur penyediaan pelayanan dan kuantitas dan kualitas layanan. Berdasarkan hasil pengolahan dari dimensi-dimensi standar pelayanan minimum dengan perhitungan kumulatif dimensi-dimensi ini termasuk pada kriteria baik. Pada pengukuran ini nilai terbesar diperoleh oleh dimensi tolok ukur penyedia pelayanan sebesar 70% dengan butir pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan diantaranya penyajian prosedur pelayanan, menjamin adanya keterbukaan pelayanan, pelayanan yang diberikan secara efektif dan efisien, penyusunan rencana pencapaian kinerja pelayanan, pengembangan SDM dan pemanfaatan SDM secara maksimal.
- d. Variabel Komitmen Organisasi yang terdiri dari 3 dimensi yaitu komitmen afektif, komitmen normative dan komitmen kontinyue. Berdasarkan hasil pengukuran terkait dengan dimensi dalam variabel komitmen organisasi diperoleh hasil akhir dimana nilai ini berada pada rentang nilai cukup baik. Adapun keseluruhan dari 3 dimensi yang ada masing-masing memiliki kriteria yang sama yaitu cukup baik.

- e. Variabel Kinerja Manajerial yang terdiri dari 7 dimensi yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervise, staffing dan representasi. Berdasarkan keseluruhan perhitungan nilai dengan penjumlahan kumulatif rata-rata dimensi pada variabel ini berada pada kriteria yang sama yaitu cukup baik. Dimana perlu adanya tanggung jawab yang baik yang dimiliki oleh kepala dinas dalam menjamin terselenggaranya organisasi yang memiliki kinerja unggul.

Peneliti selanjutnya melakukan uji analisis menggunakan pendekatan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas sektor publik, standar pelayanan minimum, komitmen organisasi, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Adapun hasil penelitian disajikan pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda**

Hipotesis Utama	$\alpha$	Nilai Sig.	Makna Hubungan
Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD	0,05	0,004	Signifikan
Sub Hipotesis	$\alpha$	Nilai Sig.	Makna Hubungan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,05	0,002	Signifikan
Akuntabilitas Publik	0,05	0,004	Signifikan
Standar Pelayanan Minimum	0,05	0,655	Tidak Signifikan
Komitmen Organisasi	0,05	0,000	Signifikan

### 3.2 Pengujian Hipotesis

Besarnya pengaruh pada setiap variabel yang diujikan pada penelitian ini untuk menguji hipotesis dari masing-masing variabel, maka diperoleh pengujian dengan persamaan regresi penelitian sebagai berikut.

$$Y = 2,396 + 0,090 X1 + 0,112 X2 - 0,63 X3 + 0,64 X4$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X4 memiliki nilai koefisien regresi yang positif. Menyatakan bahwa hubungan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan komitmen organisasi dengan kinerja manajerial SKPD adalah positif, demikian baik semakin tinggi variabel tersebut maka akan semakin tinggi dan baik juga kinerja manajerial SKPD di DISPORA Kabupaten Garut.

Sedangkan untuk variabel X3 memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel standar pelayanan minimum dengan kinerja manajerial SKPD adalah negatif, demikian bahwa semakin tinggi variabel standar pelayanan minimum, maka semakin rendah juga kinerja manajerial SKPD di DISPORA Kabupaten Garut.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan secara parsial variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, kecuali variabel standar pelayanan minimum

tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap kinerja manajerial SKPD pada lingkungan DISPORA Kabupaten Garut.

#### 4. Kesimpulan

Hasil menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Standar Pelayanan Minimum tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut.

#### Daftar Pustaka

- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Annisa, F., Sariningsih, E., & Luthfi, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 3(2), 1–14.
- Baderan, U. S., & Ingo, Y. (2018). Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 127.
- Fajri, N. R., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Rembang). *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 20(02), 61–67. Retrieved from <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/10>
- Erwati, M., & Susanti, L. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Empiris Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8(3), 13–27.
- Mardikaningsih, R. (2020). Jurnal Baruna Horizon Vol. 3, No. 1, Juni 2020. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(1), 156–169.
- Riyadi, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Daerah Tingkat I Jawa Timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*.